



Dewan Bali

Desak Ada Langkah Cepat

Terkait Problem Pencairan Dana Hibah

DENPASAR - Munculnya sejumlah pertanyaan dari masyarakat soal kejelasan dari pencairan dana hibah, memantik reaksi hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Bali. Atas mencuatnya pertanyaan hampir sebagian masyarakat Bali saat reses, anggota Dewan Bali mendesak kepada seluruh pemangku kebijakan di Bali untuk segera mengambil langkah cepat.

Seperti ditegaskan Sekretaris Komisi III DPRD Bali Wayan Disel Astawa. Saat dikonfirmasi,

masi, politisi PDI Perjuangan asal Ungasan, Kuta Selatan, ini mendesak kepada seluruh bupati, wali kota, kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan gubernur Bali untuk segera mengambil langkah cepat guna mencari solusi secara bersama terkait persoalan dana hibah.

"Bila perlu, kami akan mendorong kepada semua pemangku kebijakan untuk bersama-sama melakukan komitmen dengan mengawal dana hibah ini dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding)," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Disel, selain makin sempitnya waktu masa

jakan, maka persoalan hibah tak akan kunjung selesai. "Bagi kami, sepanjang memenuhi persyaratan, ada usulan dari kelompok masyarakat, serta penggunaan dananya mampu dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan untuk tidak dicairkan," tandasnya. Sehingga, tambah Disel dengan adanya SE Mendagri yang mengharuskan bahwa pencairan dana hibah untuk masyarakat harus berbadan hukum, diakui tidak harus disikapi dengan kaku. "Kalau sudah ada kesepakatan bersama dari penentu kebijakan melalui MoU dan pencairannya juga dilakukan melalui proses verifikasi,



DOK. RADAR BALI

Wayan Disel Astawa

tutup buku, dan belum adanya kabar kejelasan dari hasil verifikasi peraturan gubernur Bali oleh Kemendagri di Jakarta, ia juga khawatir, jika tanpa adanya komitmen dan langkah yang berani dari para penentu kebi-

ifikasi, maka embel-embel payung hukum tidaklah harus kaku," tandasnya.

Apalagi, imbuhnya, dalam permohonan dana hibah, banyak proposal dana hibah yang berasal dari kelompok banjar, PKK, desa dinas maupun desa adat dan langsung melibatkan kelian dinas maupun adat yang jelas-jelas diakui secara Undang-Undang dan mendapat gaji dari APBD. "Kalau mereka tidak diakui, berarti gaji yang diterimanya adalah illegal, dengan demikian hibah itu bisa dicairkan karena keberadaan mereka sah dan resmi diakui pemerintah," pungkasnya. (pra/han)

Edisi : Minggu, 1 November 2015

Hal. : 24



Pelindo dan KSOP Didesak Presentasi

Rencana Dermaga Curah Cair di Celukan Bawang

GEROKGAK - Pelindo III Cabang Celukan Bawang serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Celukan Bawang, diminta mempresentasikan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Celukan Bawang. Lantas sampai saat ini RIP belum final dan belum disahkan oleh Menteri Perhubungan. Kedua lembaga itu diminta melakukan presentasi di hadapan DPRD Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Presentasi rencana induk pelabuhan itu diharapkan menjelaskan secara gamblang, terkait rencana pembangunan dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang, yang akhirnya distop Polisi Pamong Praja Buleleng. Belakangan penghentian proyek pembangunan dermaga itu menimbulkan ketegangan antara DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng.

Dewan sempat menyatakan Pol PP melanggar kewenan-

ganya, karena dermaga sudah berizin. Sementara Pemkab menyatakan dermaga tak berizin, karena sampai kini pemerintah daerah belum menyetujui RIP Celukan Bawang. Belakangan baru diketahui ternyata RIP Celukan Bawang belum disahkan dan belum disetujui.

Untuk pertama kalinya sejak berpolemik dua pekan terakhir, Pemkab Buleleng dengan DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan dermaga curah cair. Tak ada aktifitas mencolok di sekitar pelabuhan. Hanya terlihat dua crane dan beberapa pipa baja yang teronggok di Dermaga III Pelabuhan Celukan Bawang.

Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra mengatakan, sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, pembangunan dermaga curah cair harus dihentikan sampai dengan batas waktu yang tak ditentukan. "Selama RIP-nya belum sah dan belum ada rekomendasi KSOP, tidak boleh beroperasi. Tidak ada alasan,"

tegas Sutjidra. Sutjidra mengemukakan pihaknya hanya ingin ada keterbukaan informasi

soal rencana pembanguana itu. Karena sampai kini, belum ada presentasi terkait rencana

induk pelabuhan. Ia khawatir jika rencana induk pelabuhan tak dipresentasikan, pembangunan di kawasan otorita pelabuhan, tidak sesuai dengan perda RTRW. Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna juga meminta Pelindo dan KSOP segera melakukan presentasi RIP. Sehingga polemik dan kesalahpahaman antara lembaga eksekutif dengan legislatif terkait penghentian sementara pembangunan proyek dermaga curah cair, bisa diselesaikan.

Supriatna pun tak menampik jika dua pekan terakhir muncul polemik berkepanjangan antara eksekutif dengan legislatif, terkait penghentian proyek dermaga curah cair oleh Pol PP Buleleng. (eps/rid)



EKA PRASETYA/RADAR BALI

SARANA BARU: Proyek dermaga curah cair di pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng yang memicu kontroversi.

Edisi : Minggu, 1 November 2015

Hal. : 29